

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie Jimly. 2007. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen Hans. 2001 *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi.
- Marzuki Mahmud Peter. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2003. *Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003*, Jakarta: Sekretariat Jenderal RI.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998 *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marthen Moonti Roy. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makasar: Perpustakaan Nasional RI.
- Mahfud MD Mohamad. 2014. *POLITIK HUKUM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Naskah Akademik Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sulaiman Faisal King. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Sulistiyowati Iryanto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-Legal, Cetakan Pertama*. 2017. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. Filsafat. *Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*. Jakarta:Rajawali Pers.

Zein Ahmad Yahya, dkk, 2010. *Legislative Drafting Perancangan Perundang Undangan*. Yogyakarta: Thafa Media.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi No : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

## YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-1/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014

## LAIN-LAIN

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 8, No 6,2011.*

Darwin Botutihe, *Politik Pembentukan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945.* Artikel, Portal Garuda.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Lex Jurnalica Vol 13, 2016.*

Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_mk.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_mk.pdf)

Fitri Meilany Langi, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap Mpr) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Vol.I, 2013.*

Meirina Fajarwati, Jurnal, *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 48, 2018.*

Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin. *Problematika Seputar Status dan Kedudukan Tap MPR dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.* Paper tersebut dapat diunduh pada laman [https://www.academia.edu/35110096/Problematika\\_Seputar\\_Status\\_dan\\_Kedudukan\\_Tap\\_MPR\\_dalam\\_Sistem\\_Perundang-Undangan\\_di\\_Indonesia1](https://www.academia.edu/35110096/Problematika_Seputar_Status_dan_Kedudukan_Tap_MPR_dalam_Sistem_Perundang-Undangan_di_Indonesia1)

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal VOL 3.*

Maria Farida, Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*

Sony Maulana Sikumbang dan kawan-kawan, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Modul 1, dapat diakses pada laman <http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>*

Tomi Agustian, *Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014, Jurnal Renaissance No. 1 VOL. 1 JANUARI 2016: 1 – 16,*

Bustanuddin, *Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, jurnal, Fungsi, Penjelasan, Pembentukan, Perundang-undangan.* Dapat diakses pada laman

<https://media.neliti.com/media/publications/43239-ID-analisis-fungsi-penjelasan-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-ind.pdf>

Depri Liber Sonata, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari metode meneliti hukum*, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol 8,

William Baude & Stephen E. Sachs, *The Law Of Interpretation*, *Harvard Law Review*, Jurnal Vol. 130:1079, [http://cdn.harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/02/1079-1147\\_Online.pdf](http://cdn.harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/02/1079-1147_Online.pdf)

Artikel Hukum (Umum-General), Kementerian Hukum dan Ham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Al' Adl*, Jurnal Volume VI No 11, <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>

